



KEDAULATAN RAKYAT

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2014
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	------

Hal: 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PEMKAB TINDAK LANJUTI LHP BPK

Kembalikan Kelebihan Pembayaran Rp 2,8 M

BANTUL (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bantul telah mengembalikan kelebihan pembayaran atas proyek pekerjaan total Rp 2,8 miliar, yang terdiri pekerjaan infrastruktur Rp 1,5 miliar dan pekerjaan pada bidang jalan sebesar Rp 1,3 miliar. Pengembalian dana ini sebagai tindak lanjut atas hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI pada Pemkab Bantul.

Dikatakan Ketua Pansus LHP BPK, Drs H Aslam Ridho, Rabu (29/1) kepada KR, disela inspeksi mendadak (sidak) Kualitas Beton Penutup drainase, di Pasar Bantul dan Pasar Unggas, sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, tugas DPRD adalah memastikan bahwa rekomendasi BPK yang tertuang di dalam LHP benar-benar ditindaklanjuti bupati. Adapun kewenangan pengawasan yang diamanatkan dalam Permendagri tersebut merupakan hal-hal yang bersifat kebijakan bukan hal-hal yang bersifat teknis.

Aslam menambahkan, berdasarkan LHP BPK 31 Desember

2013 lalu direkomendasikan agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menindaklanjuti temuan BPK dengan me-

ngembalikan kelebihan pembayaran proyek pekerjaan tersebut.

Selain itu, imbuh Aslam, Pemkab juga berkomitmen melakukan perbaikan atas beberapa proyek pekerjaan yang dianggap kurang sempurna.

"Dana senilai Rp 2,8 miliar tersebut kini telah berada di kas daerah. Dana tersebut berasal dari para rekanan yang telah mengerjakan, namun tidak sesuai spek yang ditentukan," tegas Aslam.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Yudho Wibowo menambahkan, pada saat dilakukan sampling oleh BPK, kualitas bangunan yang ditentukan belum 100 persen sesuai, meski persentasenya sangat sedikit. "Kami memerintahkan pengembang mengganti spek baru sesuai LHP BPK dan mereka menuruti, karena seluruh bangunan masih dalam masa penjaminan rekanan."

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto menambahkan, Pansus LHP BPK dibentuk sebagai tindak lanjut menanggapi audit BPK.

Berdasarkan Permendagri No.13/2010 setiap ada LHP baik bersifat keuangan, kinerja atau tujuan tertentu, direkomendasikan membentuk pansus. Adapun pansus terdiri dari 14 anggota dewan, yang dibagi merata tiap fraksi. Ditargetkan selama 14 hari kedepan pansus dapat menyelesaikan rekomendasi BPK ini.

(Aje)-m



KR-Rahajeng Pramesi

Komisi C meninjau infrastruktur di pasar Bantul dan Pasar Unggas.